



Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Karonika Sihite¹, Safuridar^{2*}, Nurlina³

¹⁻³ Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra, Langsa – Aceh, Indonesia

*Penulis Korespondensi: safuridar@unsam.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the influence of the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), and the Gross Regional Domestic Product (GRDP) on the poverty rate in North Sumatra Province. The method used is multiple linear regression analysis using secondary data from 2004 to 2023. The results show that the DAU has a negative and significant effect on the poverty rate, meaning that the greater the DAU allocation, the lower the poverty rate in the province. Conversely, the DAK has a positive and significant effect on the poverty rate, indicating that an increase in DAK is actually followed by an increase in the poverty rate. Meanwhile, GRDP shows a negative effect on the poverty rate, but the effect is not significant. The coefficient of determination obtained shows that the DAU, DAK, and GRDP are able to explain variations in the poverty rate in North Sumatra Province. Simultaneously, the test results show that all three variables have a significant effect on the poverty rate. These findings suggest the importance of proper management of fund allocation and optimization of regional economic sectors to reduce poverty effectively.

Keywords: DAK; DAU; Fiscal Policy; GRDP; Poverty Level.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2004 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti semakin besar alokasi DAU, semakin rendah tingkat kemiskinan di provinsi tersebut. Sebaliknya, DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang menunjukkan bahwa peningkatan DAK justru diikuti dengan peningkatan tingkat kemiskinan. Adapun PDRB menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, namun pengaruhnya tidak signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PDRB mampu menjelaskan variasi dalam tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Secara simultan, hasil uji menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini menyarankan pentingnya pengelolaan alokasi dana yang tepat dan pengoptimalan sektor ekonomi daerah untuk mengurangi kemiskinan secara efektif.

Kata kunci: DAK; DAU; Kebijakan Fiskal; PDRB; Tingkat Kemiskinan.

1. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah adalah kemampuan mengelola dan mengurus suatu daerah sebagai respon terhadap peralihan dari organisasi terpusat ke organisasi terdesentralisasi. Tujuan pemberian otonomi adalah meningkatkan kesejahteraan sesuai kondisi masyarakat setempat, yang merujuk pada standar hidup yang layak sekaligus indikator untuk menilai kemiskinan. Salah satu bentuk konkret dari otonomi adalah pengelolaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara. APBN sebagai instrumen alokasi anggaran kepada daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat, dengan pemanfaatan dana perimbangan, yang meliputi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, program-program yang menjawab kebutuhan dan karakteristik ekonomi daerah dapat direncanakan dan dilaksanakan. Sumber daya dikelola dengan menciptakan sektor-sektor potensial. Tujuan dana alokasi umum adalah untuk

menyeimbangkan kapasitas keuangan daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pelaksanaan desentralisasi.

Kemampuan daerah untuk mempertahankan dan menjamin standar layanan publik sangat dipengaruhi oleh besarnya transfer dana alokasi umum. Dana Alokasi umum yang lebih besar diberikan kepada daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Sementara itu, dana alokasi khusus digunakan untuk membangun dan merenovasi infrastruktur fisik guna meningkatkan standar kesehatan dan pendidikan (Priambodo & Hidayat, 2024). Menurut Suparlan dalam Pratama Yoghi, (2014) mendefinisikan bahwa ketika seseorang atau sekelompok orang hidup dalam lingkungan yang sangat kekurangan atau sumber dayanya tidak mencukupi, termasuk tidak hanya sarana keuangan tetapi juga pengetahuan, kekuatan sosial, pengaruh politik, hak hukum, akses ke layanan publik, dan peluang untuk pekerjaan dan kewirausahaan, mereka dikatakan berada dalam kemiskinan. Karena penurunan kemiskinan merupakan tanda utama keberhasilan pembangunan ekonomi, kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditangani dan terus menjadi prioritas utama pemerintah dalam agenda tahunannya, Setiawan & Prajanti, (2016). Provinsi Sumatera Utara termasuk salah satu daerah yang masih dilanda kemiskinan. Program dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan Dana Desa merupakan beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan yang terus meningkat terutama Provinsi Sumatera Utara, dana alokasi umum sangat penting untuk memerangi kemiskinan.(Ramadhina & Syafitri, 2024).

Kemiskinan menjadi masalah yang rumit untuk dipecahkan serta menjadi fokus pemerintah dalam setiap agenda tahunannya karena penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan ekonomi, Setiawan & Prajanti, (2016). Salah satu daerah yang masih memiliki masalah dengan kemiskinan yaitu Provinsi Sumatera Utara. Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- d. Untuk mengetahui pengaruh simultan antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

2. KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan

Menurut Amartya Sen dalam (Ustama, 2009) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan keterbatasan dalam memiliki kemampuan dasar untuk menjalani kehidupan yang bernilai, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial. World Bank (2001) menambahkan bahwa kemiskinan berarti kelaparan, kekurangan tempat tinggal, tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta tidak memiliki pekerjaan yang layak. Paseki et al., (2014) Dikatakan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi di suatu negara atau daerah tertentu dapat menyebabkan kemiskinan. Menurut Kuncoro dalam (Safuridar & Damayanti, 2018) kemiskinan disebabkan oleh pola kepemilikan sumber daya yang tidak merata, yang mengakibatkan distribusi pendapatan yang tidak merata dan membuat orang miskin memiliki sumber daya yang sedikit dan berkualitas buruk.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2022), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dalam satu bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu:

a. **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)**

Garis Kemiskinan Makanan Merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Konsep ini didasarkan pada standar kebutuhan kalori yang ditetapkan sebagai batas minimum untuk menjaga kesehatan dasar seseorang.

b. **Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)** Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum Adalah dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui DAU, dan daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaannya. Untuk mendorong otonomi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan haknya untuk memberikan layanan kepada publik, hal ini bertujuan untuk menutup kesenjangan keuangan dan menyamakan

kemampuan keuangan berbagai daerah. Dana alokasi umum bertujuan untuk menutup kesenjangan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan. Akibatnya, kerangka pendanaan daerah dirancang untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang memungkinkan pemerintah daerah

untuk membuat pilihan dan memikul tanggung jawab untuk memprioritaskan pengelolaan sumber daya mereka yang bertanggung jawab, efisien, produktif, dan disiplin.

Menurut Syahidin & Jalil. M, (2020) Dana alokasi umum diberikan kepada semua kota atau kabupaten dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan fisik mereka. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, yang merupakan alat penting untuk distribusi dan alokasi, terutama dalam hal penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dapat mendukung operasi-operasi pemerintahan dan menawarkan layanan-layanan publik dengan keamanan finansial berkat dana alokasi khusus, yang merupakan sumber pendanaan dari pemerintah federal (Kemala et al., 2024).

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus, menurut PP No 55 Tahun 2005 mengenai Dana Perimbangan, bersumber dari APBN dan disalurkan kepada daerah yang ditunjuk untuk mendukung pendanaan kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan prioritas nasional, dan dilaksanakan di daerah. Besaran Dana Alokasi Khusus ditetapkan oleh APBN setiap tahun. Dalam penelitian Nordiawan dan Hertianti (2010), Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membiayai fasilitas dan infrastruktur masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan tertentu atau untuk mempercepat pembangunan daerah dengan mendukung inisiatif di lokasi tertentu yang sejalan dengan prioritas nasional. Selain itu, biaya perjalanan dinas, penelitian, pelatihan, dan administrasi tidak akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus. Karena semua dana Dana ditujukan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas serta meningkatkan kualitas layanan publik, semuanya dapat dianggap sebagai pengeluaran pembangunan ,Ndadari dan Adi, dalam (Triyulianto et al., 2018) .

Dana Alokasi Khusus dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Dana Alokasi Khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus sebagai sumber pendanaan dari pemerintah pusat, memberikan stabilitas keuangan kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional pemerintahan dan memberikan layanan publik (Kemala et al., 2024)

Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto dapat didefinisikan sebagai nilai total barang jadi dan jasa yang diproduksi oleh semua unit ekonomi dan merupakan nilai tambah total yang diciptakan oleh semua unit bisnis di wilayah tersebut (BPS Sumatera Utara,2021). Menurut todaro (2000) yang menguraikan tumbuhnya ekonomi yang dihitung dengan PDRB memang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun hal itu tidak selalu menghasilkan penurunan kemiskinan secara instan. Penurunan PDRB suatu wilayah perlu dikaji dari sudut pandang konsumsi rumah tangga dan kualitas hidup. Banyak rumah tangga berpendapatan rendah terpaksa mengubah kebiasaan makan mereka ketika pendapatan mereka terbatas, memilih makanan termurah yang masih memenuhi kebutuhan dasar mereka.(Dama 2016).

Berdasarkan badan pusat statistic Sumatera Utara (2015), PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun dasar tertentu. Untuk menilai pertumbuhan ekonomi riil, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga, maka yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan. teori pertumbuhan ekonomi menurut Todaro, yang mengatakan semakin tinggi PDRB ,yang berarto semakin tinggi kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat yang dapat mengurangi kemiskinan Hal ini sejalan dengan penelitian (Ariel Faza Mahendra & Bahtiar Fitanto, 2024). Menurut Ramadhina & Syafitri, (2024) Ada tiga metode untuk menghitung PDRB: metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendapatan pengeluaran.

Penelitian Terdahulu

Amami & Asmara, (2022), Melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi” Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data sekunder dan teknik analisisnya berupa analisis regresi linier berganda dengan bantuan Software SPSS Versi 25. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan; dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan; dana alokasi khusus tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan belanja modal tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Sehingga penelitian ini sangat membantu dalam mengidentifikasi penyebab kemiskinan dalam suatu daerah.

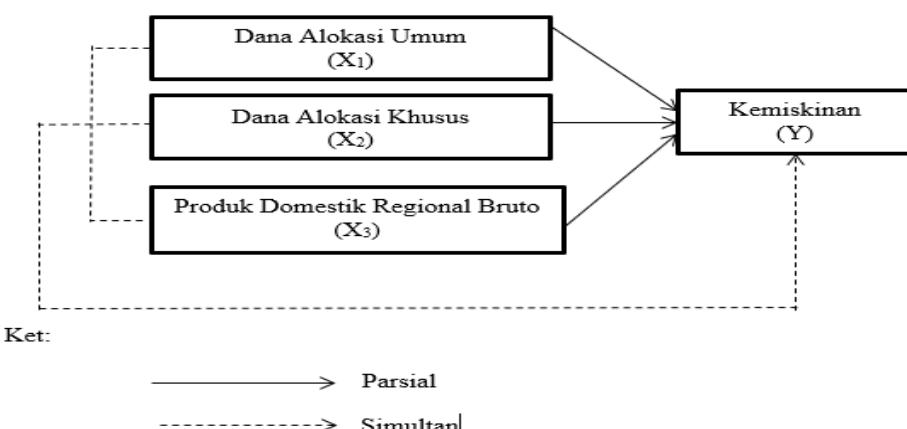
Anwar et al., (2016), Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dau, Dak, Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013)” Hasil

Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Dana Alokasi Khusus tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan.

Fitriyanti & Handayani, (2020), Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016)” Berdasarkan hasil regresi penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif signifikan terhadap penurunan Tingkat Kemiskinan. Sedangkan Belanja Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Hana et al., (2023) Melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pada dasarnya, penambahan Dana Alokasi Khusus dikaitkan dengan peningkatan tingkat kemiskinan, meskipun tidak signifikan. Penting untuk ditegaskan bahwa pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap kemiskinan menggarisbawahi adanya tantangan potensial dalam upaya pembangunan ekonomi. Meskipun peningkatan pendapatan daerah dapat diantisipasi, peningkatan tingkat kemiskinan secara bersamaan memerlukan pemeriksaan yang lebih cermat terhadap dinamika yang terjadi.

Kerangka Berpikir



Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- a. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- b. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- c. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- d. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus , Produk Domestik Regional Bruto secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder Ruang Lingkup meliputi Ekonomi publik, meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, produk domestik regional bruto, dan kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2004 -2023. Metode pengumpulan data yang di gunakan terkait seperti buku, jurnal, dan artikel tentang masalah penelitian. Selain itu, dokumentasi akan dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan resmi dan dokumen yang tersedia di instansi pemerintah, seperti Dinas Sosial, Dinas Keuangan, dan BPS Sumatera Utara.

Metode Analisis Data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Regresi linier berganda merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun menurut Gurajati (2013) bentuk model regresi linear berganda yang sudah di trasformasikan yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Kemudian ditransformasikan sehingga mudah untuk diinterpretasikan menjadi:

$$KM = \beta_0 + \beta_1 DAU + \beta_2 DAK + \beta_3 PDRB + e$$

Keterangan KM = Kemiskinan

β_0 = Bilangan Konstan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

 DAU = Dana Alokasi Umum

 DAK = Dana Alokasi Khusus

 PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

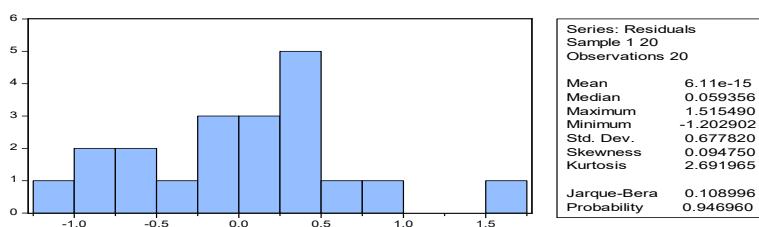
 e = standar *error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik adalah syarat-syarat dasar dalam regresi linear yang harus dipenuhi agar estimasi parameter yang dihasilkan memenuhi kriteria *BLUE* (*Best Linear Unbiased Estimator*), yaitu estimasi terbaik, linear, tidak bias, dan memiliki varians minimum seperti regresi linear berganda. Pengujian asumsi klasik dalam regresi linear berganda umumnya mencakup empat aspek utama, yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolenieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

a) Uji Normalitas



Sumber: Data diolah Eviews 10

Berdasarkan Tabel 1 hasil uji normalitas nilai *Jarque-Bera* adalah sebesar 0,108958 dengan *probability* sebesar 0,946960 dimana $> 0,05(\alpha)$, artinya residual berdistribusi normal. Hal ini membuktikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas atau dapat dipercaya.

b) Hasil Uji Multikolenieritas

Tabel 1 Uji Multikolenieritas.

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered	Centered
		VIF	VIF
C	123.7598	4536.769	NA
DAU Ln	0.456856	9196.946	6.185930
DAK Ln	0.071888	1261.245	1.165146
PDRB Ln	0.286090	1637.615	6.310617

Sumber: Data diolah Eviews 10

Syarat suatu data dinyatakan tidak korelasi antar variabel independen adalah data yang memiliki nilai VIF variabel independen $< 10,00$. Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai *centered* VIF Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Produk Domestik Regional Bruto yaitu < 10 , maka tidak terdapat masalah multikoliniearitas.

c) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2 Uji Heteroskedastisitas.

F-statistic	0.5664
Obs*R-squared	0.5093
Scaled explained SS	0.7400

Sumber: Data di olah Eviews 10

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat pada asumsi heteroskedastisitas, dengan nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar 0,5093, lebih besar dari

d) Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 3 Uji Autokorelasi.

F-statistic	0.2929
Obs*R-squared	0.2001

Sumber: Data di olah Eviews 10

Nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,2001, yang lebih tinggi dari 0,05, dalam tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dengan residual penelitian.

Uji Regresi Linear Berganda

Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara maka digunakan persamaan regresi linear berganda dalam model regresi yang pengolahannya dibantu dengan menggunakan aplikasi Eviews 10. Adapun analisis regresi linear berganda dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4 Uji Regresi Linear Berganda.

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	65.17261	5.858349	0.0000
DAU_Ln	-2.542035	-3.760901	0.0017
DAK_Ln	0.777144	2.898494	0.0105
PDRB_Ln	-0.934460	-1.747065	0.0998

Sumber: Data di olah Eviews 10

Analisis Persamaan Regresi

Berdasarkan table 5 dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 65,17261 - 5,853251 (\ln X1) + 1,789441 (\ln X2) - 0,934460 (\ln X3)$$

- Nilai konstanta adalah sebesar 65,17261 dengan makna bahwa tanpa adanya variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Produk Domestik Regional Bruto dan

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sudah mempunyai nilai sebesar 65,17261.

- b. Variabel Dana Alokasi Umum sebesar -2.542035 dengan nilai probabilitas 0,0017 lebih Kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,0017 < 0,05$) yang artinya Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh Negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di provinsi Sumatera utara sehingga hipotesis di Terima.
- c. Variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 0.777144 dengan nilai probabilitas 0,0105 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,0105 < 0,05$) yang artinya Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sehingga hipotesis di Tolak.
- d. Variabel Produk Domestik Regional Bruto sebesar -0.934460 dengan nilai probabilitas 0,0998 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,7711 < 0,05$) yang artinya Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. di provinsi Sumatera utara sehingga hipotesis ditolak.

Hasil Analisis Uji F (Simultan)

Tabel 5 Uji Simultan (Uji f).

F-statistic	53.59347
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah Eviews 10 (2025)

Hasil uji f pada penelitian ini sebesar $0,000000 < \alpha = 0,05$ maka dapat dinyatakan secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara maka pernyataan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Produk Domestik Regional Bruto secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara diterima.

Hasil Uji Signifikan Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi (R^2).

R-squared	0.909492
Adjusted R-squared	0.892522

Sumber: Data diolah Eviews 10 (2025)

Analisis Uji Signifikan Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel dependen. Adapun nilai koefisien determinasi persamaan dapat dilihat yaitu *adjusted R-squared* = 0,892522. Nilai tersebut

berarti seluruh variabel bebas, yakni Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara sebesar 89,25% sisanya 10,75% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan analisis regresi penelitian, dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang negatif dan cukup besar terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, semakin rendah tingkat kemiskinan maka semakin banyak dana alokasi umum yang diperoleh. Hal ini terjadi karena peningkatan Dana alokasi umum memberikan dampak positif dalam pengentasan kemiskinan melalui berbagai mekanisme. Salah satu faktor utama adalah peningkatan kapasitas fiskal daerah, di mana Dana alokasi Umum yang lebih besar mempermudah pemerintah daerah untuk membiayai layanan publik yang lebih baik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kualitas hidup masyarakat meningkat berkat layanan publik yang lebih baik, yang menurunkan angka kemiskinan. Dengan demikian, ada bukti yang mendukung anggapan bahwa angka kemiskinan di Terima dipengaruhi secara negatif oleh dana alokasi umum.

Selain itu, peningkatan Dana Alokasi Umum juga daerah mendukung program sosial dan ekonomi, seperti subsidi bagi usaha kecil, bantuan langsung kepada masyarakat miskin, serta pelatihan kerja, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari Dana Alokasi Umum juga berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, jembatan, dan akses listrik, dapat membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dengan demikian, masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, efektivitas pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap kemiskinan juga bergantung pada tata kelola keuangan daerah. Jika Dana Alokasi Umum dikelola dengan baik dan digunakan secara transparan, maka dampaknya dalam menurunkan angka kemiskinan akan semakin optimal. Oleh karena itu, hasil regresi yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara mencerminkan bahwa dana tersebut memiliki peran penting dalam menekan angka kemiskinan, terutama jika diikuti dengan kebijakan alokasi yang tepat dan pengelolaan yang efektif.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Amami & Asmara, 2022), (Fitriyanti & Handayani, 2020) yang memperoleh hasil bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan Dana Alokasi Khusus diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan dimana tidak sesuai dengan hipotesis awal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Khusus Bersifat Spesifik dan Tidak Langsung Berdampak pada Kemiskinan,
- b. Penerapan Dana Alokasi Khusus yang Tidak Optimal, yang menyebabkan dampak Dana Alokasi Khusus terhadap kemiskinan tidak signifikan adalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran.
- c. Distribusi dan Prioritas Alokasi yang Kurang Tepat Sasaran, meskipun Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk mendanai program yang mendukung pembangunan daerah, dalam beberapa kasus, Dana Alokasi Khusus tidak selalu difokuskan pada sektor yang langsung berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.
- d. Keterbatasan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus, efektivitas Dana Alokasi Khusus dalam menurunkan kemiskinan sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam merancang, mengelola, dan mengimplementasikan program yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus.
- e. Penyalahgunaan Dana, dalam beberapa kasus, dana yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan tujuan utamanya, baik karena in-efisiensi, korupsi, atau penyalahgunaan anggaran. Hal ini dapat menyebabkan dana yang seharusnya berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru tidak memberikan dampak yang diharapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Latifah et al., 2024) dan (Nany et al., 2022) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sukarsa et al., 2024), (Ramadhina & Syafitri, 2024) menyatakan bahwa dana alokasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Dari hasil regresi dalam penelitian ini diketahui bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Maka Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada hubungan negatif antara PDRB dan tingkat kemiskinan, hubungan ini tidak signifikan untuk memberikan dampak langsung yang nyata terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Fenomena ini dapat dijelaskan dalam beberapa faktor yaitu:

1. Keterbatasan Daya Serap Ekonomi terhadap Masyarakat Miskin

Peningkatan PDRB memang mencerminkan pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ini tidak selalu merata. Daerah dengan sektor industri besar atau perkotaan yang berkembang pesat mungkin tidak memberikan manfaat ekonomi tersebut kepada masyarakat miskin yang mayoritasnya berada di pedesaan atau sektor informal. Oleh karena itu, meskipun PDRB meningkat, banyak kelompok masyarakat yang tidak merasakan manfaatnya secara langsung.

2. Ketimpangan Pembangunan

Salah satu faktor utama yang menyebabkan pengaruh negatif PDRB terhadap tingkat kemiskinan tidak signifikan adalah ketimpangan distribusi pembangunan. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi seringkali tidak merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah perkotaan. Sektor-sektor ekonomi yang berkembang pesat, seperti industri atau perdagangan besar, mungkin tidak cukup menyentuh sektor pertanian atau UMKM yang mayoritas dikelola oleh masyarakat miskin.

3. Keterbatasan Pengelolaan Sumber Daya

Meskipun PDRB naik, ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara efektif dapat menyebabkan kemiskinan tetap tinggi. Pengelolaan dana pembangunan yang buruk atau alokasi yang tidak tepat sasaran dapat menghambat manfaat pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat yang membutuhkan.

4. Faktor-faktor Lain yang Mempengaruhi Kemiskinan

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang tidak sepenuhnya terhubung dengan pertumbuhan PDRB. Meskipun PDRB meningkat, tanpa akses yang memadai terhadap pendidikan yang berkualitas atau peluang kerja yang layak, kemiskinan tetap sulit untuk dikurangi.

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Pertumbuhan PDRB yang terjadi perlu diimbangi dengan kebijakan yang

memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi miskin. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, pemberdayaan ekonomi lokal melalui program kewirausahaan, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif. Tanpa kebijakan yang mendukung distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata, meskipun PDRB tumbuh, tingkat kemiskinan akan sulit berkurang.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ariel Faza Mahendra & Bahtiar Fitanto, 2024), (Nabila, 2015), (Priambodo & Hidayat, 2024), yang menyatakan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan, Nilai koefisien variabel Dana Alokasi Umum sebesar -5.853251 dan nilai probabilitas sebesar 0.0017 maka hasil akhir di peroleh bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Nilai koefisien variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 1.789441 dan nilai probabilitas sebesar 0.0105 maka hasil akhir di peroleh bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Nilai koefisien variabel Produk Domestik Regional Bruto sebesar -0,934460 dan nilai probabilitas sebesar 0.0998 maka hasil akhir di peroleh bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil analisis yang telah di lakukan di peroleh nilai statistik uji f sebesar 53.59347 dengan nilai probabilitas sebesar $0,000000 < \alpha = 0,05$ maka dapat dinyatakan secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Nilai adjusted R² dalam penelitian ini sebesar 0.892522 atau 89,25% artinya variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Produk Domestik Regional Bruto mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 89,25% sedangkan sisanya sebesar 10,75% di pengaruhi variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara perlu mengoptimalkan penggunaan dana dengan meningkatkan dana alokasi umum pada sektor-sektor yang langsung berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Provinsi Sumatera Utara.
- b. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara perlu memastikan bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus lebih terfokus pada program-program yang langsung berdampak pada pengurangan kemiskinan, seperti pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan layanan kesehatan, dan pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat miskin dan juga perlu diperkuat dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi, sehingga proyek yang didanai benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. pemerintah daerah provinsi sumatera utara harus berupaya untuk mendiversifikasi sektor ekonomi agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terfokus pada sektor yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, seperti industri besar. Peningkatan investasi dalam sumber daya manusia juga sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja bagi masyarakat miskin.

DAFTAR REFERENSI

- Admin Bappeda Piddie Jaya. (2023). Sosialisasi Pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun 2023. <https://bappeda.pidiejayakab.go.id>.
- Afrizal, Fitrah. 2013. Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Daerah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar
- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11, 48–54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. 1(2), 196–210.
- Anwar, M. L., Palar, S. W., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap Pertumbuhan ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 218–232.

- Ariel Faza Mahendra, & Bahtiar Fitanto. (2024). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.1.1>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi sumatera utara 2015. pertumbuhan ekonomi <https://sumut.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Sumatera Utara (2022) persentase penduduk miskin <https://sumut.bps.go.id>
- Balqis, R., & Suriani, S. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Conference on Economic and Business Innovation*, 35, 1–12.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia 2023 (www.djpk.kemenkeu.go.id)
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 79–90. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Gumelar, A., & Khairina, N. (2021). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019). *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(2), 342. <https://doi.org/10.35448/jequ.v11i2.13231>
- Hana Ema Nuela Sinaga, Salsabillah Nurul Izza, Siahaan, T., & Simangunsong, Y. S. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 412–420. <https://doi.org/10.54951/sintama.v3i3.677>
- Hasibuan, R. R. A., Kartika, A., Suwito, F. A., & Agustin, L. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 683–693. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i3.887>
- Itang. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, Dan Kebudayaan*, 16(1), 1–30.
- Kamisah, K., Arida, A., & Indra, I. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Pedesaan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 7(2), 168–176. <https://doi.org/10.17969/jimfp.v7i2.19650>
- Kemala, P., Lubis, D., Ema, H., Sinaga, N., & Nurul, S. (2024). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat

- Kemiskinan di Sumatera Utara ” Jurusan Ilmu Ekonomi , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Medan 10(June), 722–735.
- Latifah, L., Setyorini, D., & Arifin, A. (2024). Dana Otonomi Khusus , Dana Desa , dan Belanja Daerah terhadap. Jurnal ekonomika45, 12(1), 2354–6581.
- Lily Leonita, R. K. S. (2023). Pengaruh pdrb, pengangguran dan pembangunan manusia terhadap kemiskinan di indonesia. 7(3), 844–850.
- Lowing, B. D., Rotinsulu, D., & Siwu, H. (2021). Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa. Jurnal Berkala Ilmiah Efesiensi, 21(7), 69–80.
- Murti, F. R., Tan, S., & Zulfanetti. (2023). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja modal terhadap PDRB dan hubungannya dengan kemiskinan di Kota Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika, 18(2), 12–31.
- Nabila, H. A. (2015). Analisis pengaruh produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan (studi kasus pada 38 kabupaten/kota jawa timur).
- Nany, M., Pratama, D. B., Prasetyaningrum, M., & Kusumaningsih, A. U. (2022). Pengaruh Pad, Dbh, Dau, Dak Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan, 22(3), 247–261.
<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/8274%0Ahttps://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/download/8274/4938>
- Nayaka Artha Wicesa. (2016). Investasi Dan Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Tahun 2009 - 2013.
- Nurrizqi, F. A., Muchtar, M., & Sihombing, P. (2023). Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019. 3(2), 148–163.
- Paseki, M. G., Naukoko, A., & Wauran, P. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 14(3), 30–42.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/5460>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Priambodo, A. P., & Hidayat, N. W. (2024). Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap PDRB dan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v8i1.2279>
- Ramadhina, & Syafitri, W. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan. Journal of Development Economic and Social

- Studies, 3(2), 438–454. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.2.9>
- Rany, A. P. (2021). Pengaruh PAD , DAU , dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus 38 Kab / Kota Di Prov Jawa Timur Periode 2010-2019). Fakultas Ekonomi Bisnis, 175020100111037.
- Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Matematika Integratif, 14(2), 113. <https://doi.org/10.24198/jmi.v14i2.19262>
- Safuridar, S., & Damayanti, M. (2018). Analisis Pengaruh Pendidikan dan PDRB per Kapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, 9(2), 180–187. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i2.766>
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 4(2), 211–228. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>
- Sukarsa, G. P. A., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2024). Analisis Dana Alokasi Khusus, Realisasi Penanaman Modal Asing Dan Tingkat Produk Domestik Regional Bruto Untuk Mengurangi Kemiskinan Di Provinsi Bali. Journal of Law, Administration, and Social Science, 4(1), 25–34. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.686>
- Syahidin, S., & Jalil. M, A. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah. Gajah Putih Journal of Economics Review, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.55542/gpjer.v2i1.162>
- Triyulianto, T., Syafa, B., Nurvita, R., Stia, P., Jakarta, L. A. N., Kemiskinan, T., Realisasi, P., Alokasi, D., Khusus, D. A., & Sosial, B. B. (2018). Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan Pembangunan adalah proses yang memiliki tujuan untuk melakukan pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkelanjutan agar nega.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang- Undang No 30 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 45
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Ustama, D. D. (2009). Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan. Dialogue, 6(1), 1–

12.

- Wahyuningsih, Y. E. (2014). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 1(1), 39–47.